



Wajo

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

20
25



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAJO**

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

LKjIP ini menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai capaian kinerja, keuangan, dan pendapatan daerah. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan dan tantangan yang kami hadapi dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, termasuk tim penyusun, stakeholder, dan masyarakat. Kami berharap LKjIP ini dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja kami di masa mendatang.

Sengkang, 12 Januari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO,**



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700815 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	9
1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	10
2. Publikasi.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
1. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah (Jabatan Tinggi Pratama), Pejabat Administrator dan Pengawas	12
2. Publikasi.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	28
2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023	43
3. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Perangkat Daerah	44
4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun ini Dengan Standar Nasional Jika Ada	45
5. Analisa Penyebab Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Solusi.....	46
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
7. Analisis Evaluasi Program dan Kegiatan	50
8. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah...	62
B. Realisasi Anggaran	63
1. Realisasi Anggaran.....	64
2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah	72
3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
<u>LAMPIRAN</u>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Wajo No. 63 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, BPKPD Kab. Wajo merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai tugas adalah membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. dengan memiliki fungsi:

Perumusan kebijakan urusan bidang Keuangan dan Pendapatan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan; Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah; Peningkatan Pelayanan, Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB; Peningkatan Pelayanan, Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya; Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang Keuangan dan Pendapatan Daerah; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana kerja. Oleh karena itu, maka sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pegelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Wajo sebanyak 65 Orang PNS dan Orang 64 Non PNS, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1
Jumlah ASN & PPPK Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat
Dan Eselon
BPKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025

PENDIDIKAN		PANGKAT		ESELON		JENIS KELAMIN		
JENJANG	JUMLAH (Orang)	JENJANG	JUMLAH (Orang)	JENJANG	JUMLAH (Orang)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (Orang)
S2	1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	II-a	1	1	0	1
	1	Pembina Tk.I	1	III-a	1	1	0	1
	4	Pembina	4	III b	4	1	3	4
	6	Pembina	6	IV a	6	1	5	6
	4	Penata Tk.I	4	IV a	4	2	2	4
S1	1	Pembina	1	III b	1	0	1	1
	4	Penata Tk.I	4	IV-a	4	3	1	4
	18	Penata Tk.I	18	0	18	6	12	18
	3	Penata Muda TK 1	3	0	3	2	1	3
	1	Penata	1	IV-a	1	1		1
	4	Penata	4	0	4	2	2	4
	2	Pengatur Muda	2	0	2	2		2
	3	P3K	3	0	3	0	3	3
	3	Fungsional	3	0	3	0	3	3
D.III	1	Penata Muda TK 1	1		1	0	1	1
	1	Penata Muda	1		1	1	0	1
SMA/SMK	4	Penata Muda	4		4	2	2	4
	1	Pengatur	1		1	1	0	1
	2	P3K	2	0	2	0	2	2
PAKET C	1	Penata Muda	1		1	1	0	1

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian BPKPD Kabupaten Wajo 2025

Tabel 2
Jumlah Tenaga ASN PW SDM BPKPD Kabupaten Wajo Berdasarkan Jabatan

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Penata Layanan Operasional	9	13	22
2	Operator Layanan Operasional	20	19	39
Jumlah		29	32	61

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian BPKPD Kab.Wajo 2025

B. Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Kepala Badan

Tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran dan perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah, Bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang Pelayanan, Pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Sekretaris

Tugas pokok merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyalah, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbag keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Bidang Anggaran Dan Perencanaan Pendapatan

Tugas pokok membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang Penyusunan APBD, dan Perencanaan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang penyusunan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah membantu Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan Daerah dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang perencanaan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar

Bidang Perbendaharaan dan Otorisasi DPA

Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang Verifikasi dan Otorisasi DPA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Sub Bidang Verifikasi

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang verifikasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Sub Bidang Otorisasi DPA

Tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang otorisasi DPA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas pokok membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di bidang akuntansi, pelaporan keuangan setda bidang data dan

informasi keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Sub Bidang Akuntansi

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang akuntansi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan-tugas di bidang pelaporan keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang analisis kebutuhan dan inventarisasi, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pengendalian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang analisis kebutuhan dan inventarisasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pembinaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Bidang Pelayanan, Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB

Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran PBB- P2 dan BHTB, bidang penilaian dan penetapan PBB- P2 dan BPHTB serta bidang pemungutan, penagihan dan keberatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. SubBidang Pendataan Dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka

merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pendataan dan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Pemungutan, Penagihan Dan Keberatan

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan, penagihan dan keberatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya

Tugas pokok Membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di bidang pendataan dan pendaftaran, bidang penilaian dan penetapan serta bidang pemungutan, penagihan dan keberatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengawasan

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Pendataan, Pendaftaran dan Pengawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b. Sub Bidang Pemungutan, Penagihan Dan Keberatan

Tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan, penagihan dan keberatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 63 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo sebagaiberikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO**



C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

1. Permasalahan Internal

Permasalahan utama dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, meliputi:

- a. Belum adanya tenaga spesifik perpajakan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo.
- b. Berkas kelengkapan untuk penerbitan SP2D yang diajukan oleh SKPD tidak lengkap dan memenuhi tidak syarat sehingga menimbulkan keterlambatan penerbitan SP2D. Untuk itu SKPD perlu meningkatkan kedisiplinan dalam pengajuan SPM sehingga penerbitan SP2D dapat tepat waktu.
- c. Masih adanya Aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan terbatasnya Aparatur pada bidang pengelolaan Aset sehingga perlu peningkatan dan kordinasi antara bendahara pengeluaran, pengurus barang dan aparatur pengelola pada bidang asset sehingga pelaksanaan penertiban asset Barang Milik Daerah belum optimal.

2. Permasalahan Eksternal Organisasi

- a. Data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum Valid.
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dan kerjasama stakeholders dengan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai dalam satu (1) tahun sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Wajo, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tiap tahun.

Dalam penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Wajo. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dalam mendukung visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah

Tujuan tersebut menunjukkan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo sebagai Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo yang implementasinya dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, ditetapkan sasaran pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Kemandirian Fiskal
3. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan dan Sasaran dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Daerah (IKU RPD) Tahun 2025-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2025

IKU RPD	Target RPD Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4	5
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75.69	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah urusan keuangan, aset dan pendapatan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	92
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14
			Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20
			Indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan	14
			Indeks penyerapan anggaran	16
			Indeks Kondisi Keuangan Daerah	13
			Indeks Opini BPK	15
		Meningkatnya kemandirian fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	11%
Nilai / Predikat SAKIP Kabupaten	64.3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

2. Publikasi

The screenshot displays the 'Renstra' (Regional Strategic Plan) system interface. It features a navigation menu on the left and a main content area with a table of documents. The table includes columns for 'No', 'Nama', 'Misi Kerja', 'Tgl Update', 'Status', 'Revisi', 'Aksi', and 'Tindakan'. Three documents are listed, all with a status of 'Lengkap' (Complete).

No	Nama	Misi Kerja	Tgl Update	Status	Revisi	Aksi	Tindakan
1	Renstra 2025-2029	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	08 Jun 2024 13:23	Lengkap	Revisi 14, 2025-2029	Lengkap	🔍
2	Renstra 2025-2029	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	08 Jun 2024 08:55	Lengkap	Revisi 14, 2025-2029	Lengkap	🔍
3	Renstra 2025-2029	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	07 Jun 2024 21:35	Lengkap	REVISI 14, PERUBAHAN 15 15 2024	Lengkap	🔍

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara atasan dan bawahan selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas outcome disamping output dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 4 Program dan 14 Kegiatan dengan pagu anggaran **Rp.257.519.321.868,-**

1. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah (Jabatan Tinggi Pratama), Pejabat Administrator dan Penagawas

Tabel 2.2
Rekapitulasi Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Wajo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Nilai	81	Nilai	35.435.651.913	31.812.521.363	ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.	KEPALA BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	%	100	%	35.435.651.913	31.812.521.363	ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.	SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu	100	%	100	%	58.405.000	44.801.000	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	27.368.500	21.664.500	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	4.038.000	4.038.000	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.837.000	6.837.000	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.827.400	2.827.400	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.609.800	2.609.800	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.045.000	3.045.000	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.279.300	3.779.300	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000	0	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	700.000	0	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	15.408.926.831	13.004.056.721	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	816 Orang/Bulan	816 Orang/Bulan	15.343.459.331	12.938.589.221	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	58.205.000	58.205.000	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.851.000	4.851.000	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.411.500	2.411.500	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	100 %	115.600.000	38.385.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	157 Paket	157 Paket	49.920.000	12.700.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	17.685.000	17.685.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasikan Peraturan Perundangan-undangan	25 Orang	25 Orang	47.995.000	8.000.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	100 %	100 %	988.219.800	557.598.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	9.994.800	15.050.500	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	165.455.000	0	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	446.776.000	238.050.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	365.994.000	304.497.500	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang diadakan	100 %	100 %	306.386.000	397.305.800	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	306.386.000	397.305.800	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	100 %	17.671.781.392	17.352.229.892	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	75.172.500	89.548.500	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	17.260.446.692	16.932.123.392	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.120.000	20.890.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	316.042.200	309.668.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan yang Terpelihara	100 %	100 %	886.332.890	418.144.950	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	83.030.000	72.692.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	140.060.000	108.930.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	619.102.890	198.232.950	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	44.140.000	38.290.000	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;	14 Nilai	14 Nilai	236.286.246.977	221.936.349.905	ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.	KEPALA BPKPD KAB. WAJO
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	14 Nilai	14 Nilai				
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	13 Nilai	13 Nilai				
		Indeks penyerapan anggaran	20 Nilai	20 Nilai				
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	16 Nilai	16 Nilai				
		Indeks Opini BPK	15 Nilai	15 Nilai				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	235.577.228.277	220.974.716.939	ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si., SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P., ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si., SUARDI, S.Sos., Dra. Hj.SITTI FATIMAH	SEKRETARIS ,KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGENDALIAN OTORISASI DPA, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD secara Tepat Waktu	100 %	100 %	2.022.474.800	1.769.180.500	SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	34.547.000	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	34.547.000	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	18.347.400	17.915.400	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	27.925.200	55.519.100	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	815.521.600	746.457.000	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	798.650.600	755.029.000	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	167.280.000	115.997.000	YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.865.500	1.926.500	H. AKAS, S.Sos.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang	76.884.500	7.242.500	YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	1.020.785.100	867.806.200	ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGENDALIAN OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	780 Dokumen	780 Dokumen	49.290.300	10.101.000	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	401.073.600	331.203.000	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	124.971.900	88.472.500	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub. Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	65.222.000	38.044.000	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	92 Orang	92 Orang	380.227.300	399.985.700	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO
	Terselenggaranya Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah OPD yang menyeter Pelaporan Keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	670.864.900	432.549.578	Dra. Hj.SITTI FATIMAH	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen	17.830.800	28.902.000	ANDI NURHAEDAH, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	33.134.900	10.236.878	IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	420.196.800	256.629.100	IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	178.509.700	115.588.900	ANDI NURHAEDAH, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	41 Orang	41 Orang	21.192.700	21.192.700	IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	231.786.724.977	217.833.227.961	ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.	SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	204.790.152.100	205.890.152.100	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000.000	5.026.657.361	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO

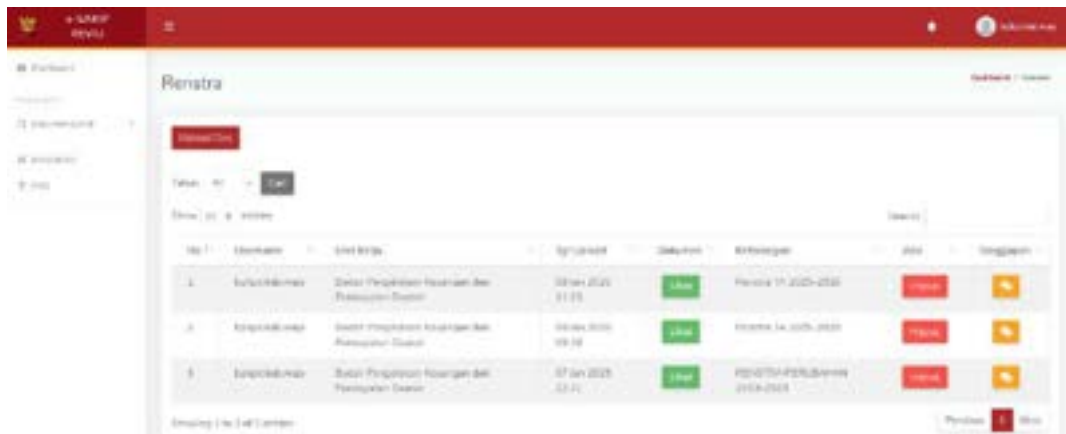
No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	6.996.572.877	6.916.418.500	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah yang dikelola	100 %	100 %	76.378.500	71.952.700	SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	76.378.500	71.952.700	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	100 %	709.018.700	961.632.966	SUARDI, S.Sos.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah OPD yang menyeter Laporan BMD secara tepat waktu	100 %	100 %	709.018.700	961.632.966	SUARDI, S.Sos.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	50 Dokumen	50 Dokumen	26.598.800	20.098.800	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	7.252.500	7.252.500	Dra. Hj. RESNA, M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	167.540.700	301.633.200	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	6.629.500	6.629.500	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	30.969.600	130.969.600	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	12.870.900	5.782.500	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	1	Laporan	457.156.700	489.266.866	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	11	%	11	%	4.663.715.200	3.770.450.600	ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.	KEPALA BPKPD KAB. WAJO
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	100	%	100	%	4.663.715.200	3.770.450.600	SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si., H. ASHAWALUDDIN, ST., MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB, KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	109 %	100 %	4.663.715.200	3.770.450.600	SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si., H. ASHAWALUDDIN, ST., MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB, KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	171.723.600	47.515.800	RAMLANSYAH, S.H.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	51.550.000	0	Hj. SATRIAWATI, SE., M.Si. & ARIF, S.Sos	KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB. WAJO
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	101.835.200	72.800.000	A. SRI RAHAYU NINGSI, S.E.	PENILAI PEMERINTAH BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.	1 Laporan	1 Laporan	230.027.000	94.930.700	ASTIDAR, S.E.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	357600 Objek Pajak	357600 Objek Pajak	2.251.262.000	2.215.206.700	Hj. SATRIAWATI, SE., M.Si. & ARIF, S.Sos	KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PBB-P2 DAN BPHTB, KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PBB-P2 DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.031.899.700	883.426.200	ANDI SOJI FEBRIANTY, SE	KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	613.804.500	231.530.500	RAMLANSYAH, S.H.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	211.613.200	225.040.700	ASTIDAR, S.E.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO

2. Publikasi



The screenshot displays the 'Renstra' management interface. It features a sidebar on the left with navigation options like 'Dashboard', 'Renstra', 'Kendali Mutu', 'Kelembagaan', 'Kelembagaan Baru', and 'Lain-lain'. The main content area is titled 'Renstra' and includes a search bar and a table of publications. The table has columns for 'No', 'Uraian', 'Sub-Program', 'Tanggal', 'Status', 'Periode', and 'Tindakan'. Three rows of data are shown, each with a green 'Dipublikasikan' status button and a yellow 'Tindakan' button.

No	Uraian	Sub-Program	Tanggal	Status	Periode	Tindakan
1	Keprocak-maha	Substansi Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Daerah	08 Jan 2025 11:15	Dipublikasikan	Periode 11, 2024-2025	Tindakan
2	Keprocak-maha	Substansi Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Daerah	08 Jan 2025 09:10	Dipublikasikan	Periode 14, 2024-2025	Tindakan
3	Keprocak-maha	Substansi Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Daerah	07 Jan 2025 12:11	Dipublikasikan	Periode 15, 2024-2025	Tindakan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada tahun 2025.
2. Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja.
4. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	80,81	99,77%	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14	9,820	70,14%	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	14	6,5278	46,63%	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	13	15,00	115,38%	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks penyerapan anggaran	20	20,00	100,00%	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	16	8,0000	50,00%	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Opini BPK	15	10,00	66,67%	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	11%	15,65%	142,27%	

Dari tabel di atas, terdapat tiga sasaran yang terbagi dalam 8 indikator. Dari 8 indikator, hanya 1 Indikator yang dapat di Evaluasi yaitu oleh BPKPD Tahun 2025 yaitu Persentase kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah yaitu 15.56% dari terget sebesar 11% dengan capaian 142.27%. Selain dari itu, pengukuran dilakukan oleh Kemendagri dan Inspektorat.

Pengukuran oleh Kemendagri terhadap Indikator IPKD Tahun 2025 akan rilis di Bulan Desember Tahun 2026. Sedangkan Penilaian terhadap Nilai Sakip akan terbit di bulan Maret atau April.

Pencapaian Indikator tersebut tidak lepas dari kerjasama yang erat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi		Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
								Nama	Jabatan	
1	2	3	4		6		7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Nilai	81	Nilai	99,77%	ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.	KEPALA BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	%	95,24	%	95,24%	ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.	SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu	100	%	100	%	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	HARYADI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	816 Orang/Bulan	816 Orang/Bulan	100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	66.67 %	66.67%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	157 Paket	157 Paket	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasikan Peraturan Perundangan-undangan	25 Orang	0 Orang	0,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	100 %	100 %	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang diadakan	100 %	100 %	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	100 %	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan yang Terpelihara	100 %	100 %	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	100,00%	AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO	

Tabel 3.1.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi		Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan	
								Nama	Jabatan		
1	2	3	4		5		7	7	8	9	
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14	Nilai	10	Nilai	70,14%	ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.	KEPALA BPKPD KAB. WAJO		
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	14	Nilai	7	Nilai	46,63%				
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	13	Nilai	15	Nilai	115,38%				
		Indeks penyerapan anggaran	20	Nilai	20	Nilai	100,00%				
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	16	Nilai	8	Nilai	50,00%				
		Indeks Opini BPK	15	Nilai	10	Nilai	66,67%				
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100,00%	ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si., SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P., ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si., SUARDI, S.Sos., Dra. Hj.SITTI FATIMAH	SEKRETARIS ,KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGENDALIAN OTORISASI DPA, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN		
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD secara Tepat Waktu	100	%	100	%	100,00%	SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO		
bb	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO		
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO		

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi		Capaian		Penanggung Jawab		Keterangan
									Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39	Dokumen	39	Dokumen	100,00%	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO		
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39	Dokumen	39	Dokumen	100,00%	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO		
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO		
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO		
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO		
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	H. AKAS, S.Sos.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO		
	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52	Orang	52	Orang	100,00%	YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO		
	Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	100	%	100,00%	ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGENDALIAN OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO		

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi		Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan
								Nama	Jabatan	
1	2	3	4		5		7	7	8	9
	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	780	Dokumen	780	Dokumen	100,00%	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub. Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi		Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan
							Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	92 Orang	92 Orang		100,00%	HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.	KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO	
	Terselenggaranya Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah OPD yang menyetor Pelaporan Keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %		100,00%	Dra. Hj.SITTI FATIMAH	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen		100,00%	ANDI NURHAEDAH, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi		Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan
							Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen		100,00%	ANDI NURHAEDAH, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	41 Orang	41 Orang		100,00%	IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %		100,00%	ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.	SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi		Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan
							Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah yang dikelola	100 %	100 %		100,00%	SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		100,00%	ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	100 %		100,00%	SUARDI, S.Sos.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah OPD yang menyetor Laporan BMD secara tepat waktu	100 %	100 %		100,00%	SUARDI, S.Sos.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	50 Dokumen	50 Dokumen		100,00%	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		100,00%	Dra. Hj. RESNA, M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi		Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan
							Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5		7	7	8	9
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		100,00%	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO	
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO	

Tabel 3.1.3 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kemandirian Fiskal

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	11 %	15,65 %	142,27%	ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.	KEPALA BPKPD KAB. WAJO	
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	100 %	61,86 %	61,86%	SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si., H. ASHAWALUDDIN, ST., MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB, KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA	
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	100 %	72,83 %	72,83%	SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si., H. ASHAWALUDDIN, ST., MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB, KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA	
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	RAMLANSYAH, S.H.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	A. SRI RAHAYU NINGSI, S.E.	PENILAI PEMERINTAH BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	ASTIDAR, S.E.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO	

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	357600 Objek Pajak	357.600 Objek Pajak	100,00%	Hj. SATRIAWATI, SE., M.Si. & ARIF, S.Sos	KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PBB-P2 DAN BPHTB , KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PBB-P2 DAN BPHTB	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	ANDI SOJI FEBRIANTY, SE	KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	RAMLANSYAH, S.H.,M.Si.	KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	ASTIDAR, S.E.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO	

2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

a. Capaian Realisasi Tahun 2023-2025

Perbandingan hasil indikator pada PK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Realisasi			Keterangan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,80	73.35	73.35	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14,162	9,820	9,820	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	6,5278	6,5278	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	13,966	15,00	15,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks penyerapan anggaran	15	20,00	20,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	4,871	8,0000	8,0000	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Opini BPK	15,00	10,00	10,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	14,65%	8.97%	15,65%	-

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah setiap tahun fluktuatif. Dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan sebesar 5.68% dan ditahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6.68%.
2. Indeks dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan, Indeks penyerapan anggaran, Indeks Kondisi Keuangan Daerah, Indeks Opini BPK, belum dapat diukur pada tahun 2025 disebabkan pengukuran indikator tersebut dilakukan pada periode tahun selanjutnya.
3. Nilai Sakip Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7.45% dari tahun 2023. Untuk Tahun 2025 Nilai Sakip belum dapat diukur karena pengukuran indikator tersebut dilakukan pada periode tahun selanjutnya.

3. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target PK Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81	80,81	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14	14	9,820	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	20	6,5278	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	14	14	15,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks penyerapan anggaran	16	16	20,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	13	13	8,0000	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Opini BPK	15	15	10,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	11,00%	11,00%	15,65%	-

4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2025	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81		80,81	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14		9,820	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20		6,5278	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	14		15,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks penyerapan anggaran	16		20,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	13		8,0000	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
		Indeks Opini BPK	15		10,00	Data Realisasi Menggunakan Data 2024
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	11,00%		15,65%	-

5. Analisa Penyebab Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Solusi

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Dan Solusi

No	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja	Upaya yang Telah Dilakukan	Solusi
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,77%	Masih terdapat data kinerja yang tidak terverifikasi atau kurang akurat, belum maksimal dalam menghadirkan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat, Sebagian aparaturnya masih berorientasi pada rutinitas, bukan pada pencapaian hasil.	Implementasi aplikasi berbasis elektronik untuk perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, Publikasi capaian kinerja secara terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas	Mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal dan menyiapkan strategi mitigasi, Rotasi dan mutasi pegawai harus diimbangi dengan program knowledge transfer agar tidak terjadi penurunan kualitas, Menyelaraskan SAKIP daerah dengan sistem akuntabilitas nasional agar konsistensi tetap terjaga, Melibatkan pihak eksternal (akademisi/masyarakat) dalam evaluasi kinerja untuk menjaga objektivitas
2	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	70,14%	Program/kegiatan yang direncanakan tidak sepenuhnya terakomodasi dalam penganggaran karena keterbatasan fiskal, Masih ada perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan indikator outcome yang lemah, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam anggaran, Adanya penyesuaian kebijakan mendadak (misalnya refocusing anggaran) menyebabkan perencanaan awal tidak sesuai dengan penganggaran akhir, Sinkronisasi antar OPD belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih program atau gap antar dokumen, - Keterbatasan Kapasitas SDM	Dilakukan bimbingan teknis oleh Bappeda dan Inspektorat terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, Pemanfaatan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting untuk mengurangi ketidaksesuaian antar dokumen, Pemeriksaan kesesuaian antara Renja OPD dengan RKPD sebelum masuk ke tahap penganggaran, Pelaksanaan forum lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan prioritas program	Menetapkan mekanisme satu data agar semua dokumen saling terhubung, Peningkatan Kompetensi Aparatur, Menetapkan aturan bahwa setiap program prioritas dalam RPJMD wajib terakomodasi dalam APBD, Melibatkan akademisi atau pihak eksternal untuk menilai kesesuaian dokumen secara objektif, Membentuk tim lintas OPD khusus untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
	Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	46,63%	Program prioritas daerah belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi anggaran, sehingga terjadi mismatch antara rencana dan realisasi, Porsi belanja pegawai dan operasional masih sangat tinggi dibandingkan belanja pembangunan dan pelayanan publik, Pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas membuat ruang fiskal untuk belanja pembangunan semakin sempit	Mengalihkan sebagian anggaran dari belanja rutin ke program prioritas pembangunan, Digitalisasi proses penganggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Melibatkan Bappeda, OPD, dan DPRD dalam forum bersama untuk menyelaraskan prioritas	Menetapkan indikator outcome yang jelas agar anggaran benar-benar mendukung pencapaian hasil pembangunan, Meningkatkan pendapatan daerah melalui inovasi pajak/retribusi dan pengelolaan aset daerah, Mengurangi program yang tidak berdampak langsung, fokus pada program unggulan yang memberi manfaat besar bagi masyarakat, Memastikan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) terhubung langsung dengan APBD melalui sistem digital terpadu

No	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja	Upaya yang Telah Dilakukan	Solusi
1	2	3	4	5	6
	Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	115,38%	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, Publikasi Dokumen Keuangan Secara Rutin, Penguatan Regulasi Transparansi, Dukungan penuh dari kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Membuka kanal resmi (website, media sosial, aplikasi) untuk publikasi laporan keuangan, Melibatkan Inspektorat dan BPK dalam pengawasan keuangan secara berkala	Pengembangan Dashboard Keuangan Publik, Menyatukan seluruh aplikasi keuangan daerah dalam satu platform terpadu, Menyediakan data keuangan dalam format terbuka agar mudah diakses dan dianalisis oleh publik, Mengundang akademisi dan lembaga independen untuk menilai kualitas transparansi keuangan daerah, Menetapkan standar operasional prosedur agar transparansi tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan
	Indeks penyerapan anggaran	100,00%	Perencanaan Anggaran yang Matang, Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi, Dukungan penuh dari pimpinan daerah serta koordinasi lintas perangkat daerah yang solid, Kedisiplinan dalam Pelaksanaan Program, Proses pengadaan barang/jasa dan pencairan anggaran berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berarti	Digitalisasi Pengelolaan Anggaran, Penguatan Koordinasi Lintas OPD, Pendampingan Teknis, Evaluasi triwulanan untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai target	Pastikan penyerapan anggaran menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya angka serapan, Setiap rupiah anggaran harus dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas, Memastikan distribusi penyerapan anggaran merata sepanjang tahun, Inspektorat melakukan audit sejak awal pelaksanaan untuk mencegah penyimpangan, Penguatan SDM Pengelola Keuangan
	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	50,00%	Ketertanggung Tinggi pada Dana Transfer Pusat, Porsi belanja pegawai dan operasional terlalu besar dibandingkan belanja pembangunan dan pelayanan publik, Banyak aset daerah belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber pendapatan, Retribusi dan pajak daerah belum dikembangkan secara kreatif sesuai potensi lokal, Perlambatan ekonomi daerah menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan retribusi	Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran, Refocusing anggaran untuk mengurangi belanja yang tidak produktif, Implementasi aplikasi e-PAD untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan daerah,	Mengembangkan potensi PAD baru, seperti pajak berbasis digital, pariwisata, dan pengelolaan aset produktif, Membatasi pertumbuhan belanja pegawai dan operasional agar ruang fiskal lebih longgar, Inventarisasi dan optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, Mendorong investasi daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal, Publikasi kondisi keuangan daerah secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, Melatih aparatur di bidang manajemen keuangan daerah agar lebih profesional dan adaptif
	Indeks Opini BPK	66,67%	Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan terhadap Regulasi, - Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Optimal, Aparatur pengelola keuangan belum sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintahan (SAP), Masih ada dokumen pendukung transaksi yang tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur	Perbaiki Sistem Pengendalian Intern. Pendampingan dari BPKP dan Inspektorat, Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, Inventarisasi Aset Daerah, Pelatihan aparatur tentang akuntansi pemerintahan, pengadaan barang/jasa, dan manajemen aset	Penguatan Tata Kelola Keuangan, Optimalisasi Manajemen Aset, Audit Internal yang Lebih Ketat, Peningkatan Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Melakukan konsultasi rutin agar laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan BPK

No	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja	Upaya yang Telah Dilakukan	Solusi
1	2	3	4	5	6
3	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	142,27%	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah (misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, parkir) berjalan efektif, Digitalisasi Sistem Pemungutan PAD, Pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa meningkatkan basis pajak dan retribusi, Adanya kenaikan transfer DBH dari pusat, baik dari pajak maupun sumber daya alam, Dukungan penuh kepala daerah dalam mendorong kemandirian fiskal melalui PAD	Penyesuaian tarif dan regulasi pajak/retribusi agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi, Implementasi sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi untuk meminimalisir kebocoran penerimaan, Edukasi dan kampanye kepatuhan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat	Pastikan peningkatan PAD dan DBH benar-benar berdampak pada pelayanan publik, bukan hanya angka penerimaan, Inventarisasi, sertifikasi, dan optimalisasi aset daerah agar menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, Mengembangkan pajak berbasis transaksi digital (e-commerce, transportasi online) sesuai perkembangan ekonomi, Melatih aparatur pengelola PAD agar lebih profesional dan adaptif terhadap teknologi, Publikasi penerimaan PAD dan DBH secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Menyiapkan strategi antisipasi jika terjadi penurunan DBH atau perlambatan ekonomi

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.6

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	99,77%	31.812.521.363	27.016.341.453	84,92%	Tingginya akuntabilitas (99,77%) menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran tidak penuh (84,92%), kualitas tata kelola tetap terjaga. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian sasaran tidak semata bergantung pada besarnya anggaran yang diserap, melainkan pada efektivitas penggunaan anggaran	
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74,80%	221.936.349.905	201.507.858.861	90,80%	Realisasi tinggi (90,80%), Kinerja sedang (74,80%) mengindikasikan adanya inefisiensi sumber daya, Anggaran sudah banyak digunakan, tetapi hasil kinerja belum maksimal (sedang)	
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	142,27%	3.770.450.600	3.713.721.873	98,50%	Realisasi tinggi (98,50%) + Kinerja sangat tinggi (142,27%) hal ini menunjukkan adanya efisiensi dan efektivitas sumber daya. Artinya, hampir seluruh anggaran digunakan, dan hasil yang dicapai bahkan melampaui target. Ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari yang direncanakan.	-

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak selalu menjamin capaian kinerja yang maksimal seperti yang terjadi pada sasaran kedua yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, efisiensi sumber daya ditentukan oleh kesesuaian antara penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja seperti pada sasaran kesatu dan sasaran ketiga. Perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program/kegiatan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja.

7. Analisis Evaluasi Program /Kegiatan

Berikut disajikan daftar analisis evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 3.7
Analisis Evaluasi Program, Kegiatan Dan Subkegiatan

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,77%							
	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	98,05%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu	100,00%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100,00%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Persentase Pegawai PD yang dilayani	86,34%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	100,00%			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100,00%			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
		Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasikan Peraturan Perundang-undangan	0,00%			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	100,00%		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100,00%			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00%			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
		Persentase BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang diadakan	100,00%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00%			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	100,00%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase BMD Penunjang Urusan yang Terpelihara	100,00%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100,00%			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;	70,14%							
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	46,63%							

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan Keuangan	115,38%							
		Indeks penyerapan anggaran	100,00%							
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	50,00%							
		Indeks Opini BPK	66,67%							
		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
		Persentase Penetapan APBD secara Tepat Waktu	100,00%		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100,00%			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				
		Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	100,00%			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100,00%			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100,00%			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100,00%			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100,00%			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100,00%			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
		Jumlah Petunjuk Teknis Administasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub. Kegiatan	100,00%			Penyusunan Petunjuk Teknis Administasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	100,00%			Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				
		Persentase Jumlah OPD yang menyetor Pelaporan Keuangan secara tepat waktu	100,00%		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100,00%			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100,00%			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100,00%			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100,00%			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	100,00%			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				
		Persentase Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100,00%			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100,00%			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	100,00%			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
		Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah yang dikelola	100,00%		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100,00%			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				
		Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai standar	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
		Persentase Jumlah OPD yang menyeter Laporan BMD secara tepat waktu	100,00%		Pengelolaan Barang Milik Daerah					
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	100,00%			Penyusunan Standar Harga				
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100,00%			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100,00%			Pengamanan Barang Milik Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100,00%			Penilaian Barang Milik Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100,00%			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100,00%			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100,00%			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	142,27%							
		Persentase Peningkatan PAD	61,86%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
		Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	72,83%		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Subkegiatan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100,00%			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.	100,00%			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100,00%			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100,00%			Penagihan Pajak Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100,00%			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,00%			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 4 Program, 14 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan. Semua program, kegiatan dan subkegiatan terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah.

8. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah

Berikut disajikan table tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi inspektorat daerah.

Tabel 3.8
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah

No	Rekomendasi Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut yang telah dilakukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Dokumen Perencanaan kinerja agar lebih maksimal memublikasikan tepat waktu dalam esr.menpan.go.id, yakni seluruh dokumen perencanaan baik Dokumen Perencanaan Pokok maupun Perubahan	Telah ditindaklanjuti Tahun 2026	Telah di update di aplikasi esr.menpan.go.id
2	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki dengan melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti Tahun 2026	
3	Dokumen Laporan Kinerja yang telah dipublikasikan melalui website https:// esr.menpan.go.id , selain itu agar memaksimalkan memublikasikan dalam media lain (Surat Kabar, dan Inovasi lainnya) yang memudahkan publik untuk mengakses.	Belum dilakukan publikasi di media lain	
4	Agar menindaklanjuti seluruh temuan hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dengan melampirkan bukti dukung dan diupload di esr.menpan.go.id	Telah ditindaklanjuti Tahun 2026	Telah di update di aplikasi esr.menpan.go.id

B. Realisasi Anggaran

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo telah mencapai nilai melebihi target yang ditentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja.

Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Renja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja. Maka untuk target dan realisasi dari anggaran dapat dicapai seperti tersebut pada tabel 3.8 sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.938.589.221	18.475.285.392	0	0	0	398.646.750	31.812.521.363	9.544.470.446	17.471.871.007	0	0	0	0	27.016.341.453	84,92%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	44.801.000	0	0	0	0	44.801.000	0	44.620.400	0	0	0	0	44.620.400	99,60%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.664.500					21.664.500		21.535.500					21.535.500	99,40%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.038.000					4.038.000		4.005.500					4.005.500	99,20%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		6.837.000					6.837.000		6.830.500					6.830.500	99,90%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.827.400					2.827.400		2.816.400					2.816.400	99,61%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.609.800					2.609.800		2.608.200					2.608.200	99,94%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.045.000					3.045.000		3.045.000					3.045.000	100,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.779.300					3.779.300		3.779.300					3.779.300	100,00%	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.938.589.221	65.467.500	0	0	0	0	13.004.056.721	9.544.470.446	65.224.420	0	0	0	0	9.609.694.866	73,90%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.938.589.221						12.938.589.221	9.544.470.446						9.544.470.446	73,77%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		58.205.000					58.205.000		58.016.000					58.016.000	99,68%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.851.000					4.851.000		4.821.000					4.821.000	99,38%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2.411.500					2.411.500		2.387.420					2.387.420	99,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	38.385.000	0	0	0	0	38.385.000	0	29.606.058	0	0	0	0	29.606.058	77,13%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12.700.000					12.700.000		12.065.058					12.065.058	95,00%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		17.685.000					17.685.000		17.541.000					17.541.000	99,19%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8.000.000					8.000.000		0					0	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	557.598.000	0	0	0	0	557.598.000	0	532.473.973	0	0	0	0	532.473.973	95,49%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.050.500					15.050.500		14.389.000					14.389.000	95,60%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		238.050.000					238.050.000		213.604.473					213.604.473	89,73%	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		304.497.500					304.497.500		304.480.500					304.480.500	99,99%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	11.007.000	0	0	0	386.298.800	397.305.800	0	388.071.508	0	0	0	0	388.071.508	97,68%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		11.007.000				386.298.800	397.305.800		388.071.508					388.071.508	97,68%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	17.352.229.892	0	0	0	0	17.352.229.892	0	16.047.947.541	0	0	0	0	16.047.947.541	92,48%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		89.548.500					89.548.500		89.344.002					89.344.002	99,77%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		16.932.123.392					16.932.123.392		15.641.434.872					15.641.434.872	92,38%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.890.000					20.890.000		16.896.000					16.896.000	80,88%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		309.668.000					309.668.000		300.272.667					300.272.667	96,97%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	405.797.000	0	0	0	12.347.950	418.144.950	0	363.927.107	0	0	0	0	363.927.107	87,03%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		72.692.000					72.692.000		41.026.819					41.026.819	56,44%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		108.930.000					108.930.000		102.183.494					102.183.494	93,81%	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		185.885.000				12.347.950	198.232.950		189.335.294					189.335.294	95,51%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		38.290.000					38.290.000		31.381.500					31.381.500	81,96%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	3.141.488.978	5.026.657.361	6.916.418.500	205.890.152.100	0	220.974.716.939	0	2.997.266.878	663.440.000	6.701.978.800	190.714.113.665	0	201.076.799.343	91,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0	1.769.180.500	0	0	0	0	1.769.180.500	0	1.690.004.769	0	0	0	0	1.690.004.769	95,52%	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		34.547.000					34.547.000		33.974.065					33.974.065	98,34%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		34.547.000					34.547.000		33.989.366					33.989.366	98,39%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		17.915.400					17.915.400		16.992.900					16.992.900	94,85%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		55.519.100					55.519.100		55.377.200					55.377.200	99,74%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		746.457.000					746.457.000		718.718.765					718.718.765	96,28%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		755.029.000					755.029.000		715.535.420					715.535.420	94,77%	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		115.997.000					115.997.000		106.268.872					106.268.872	91,61%	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		1.926.500					1.926.500		1.916.284					1.916.284	99,47%	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		7.242.500					7.242.500		7.231.897					7.231.897	99,85%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0	867.806.200	0	0	0	0	867.806.200	0	820.461.914	0	0	0	0	820.461.914	94,54%	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		10.101.000					10.101.000		9.448.500					9.448.500	93,54%	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		331.203.000					331.203.000		312.450.314					312.450.314	94,34%	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		88.472.500					88.472.500		88.409.600					88.409.600	99,93%	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		38.044.000					38.044.000		30.491.500					30.491.500	80,15%	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		399.985.700					399.985.700		379.662.000					379.662.000	94,92%	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0	432.549.578	0	0	0	0	432.549.578	0	421.306.640	0	0	0	0	421.306.640	97,40%	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		28.902.000					28.902.000		24.519.590					24.519.590	84,84%	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		10.236.878					10.236.878		9.501.100					9.501.100	92,81%	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		256.629.100					256.629.100		256.269.586					256.269.586	99,86%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		115.588.900					115.588.900		111.315.264					111.315.264	96,30%	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		21.192.700					21.192.700		19.701.100					19.701.100	92,96%	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	5.026.657.361	6.916.418.500	205.890.152.100	0	217.833.227.961	0	0	663.440.000	6.701.978.800	190.714.113.665	0	198.079.532.465	90,93%	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					205.890.152.100	205.890.152.100					190.714.113.665		190.714.113.665	92,63%		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			5.026.657.361			5.026.657.361			663.440.000				663.440.000	13,20%		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				6.916.418.500		6.916.418.500				6.701.978.800			6.701.978.800	96,90%		
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0	71.952.700	0	0	0	71.952.700	0	65.493.555	0	0	0	0	65.493.555	91,02%		
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		71.952.700				71.952.700		65.493.555					65.493.555	91,02%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0	766.632.966	0	0	0	195.000.000	961.632.966	0	431.059.518	0	0	0	431.059.518	44,83%		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	766.632.966	0	0	0	195.000.000	961.632.966	0	431.059.518	0	0	0	431.059.518	44,83%		
	Penyusunan Standar Harga		20.098.800				20.098.800		19.071.800					19.071.800	94,89%		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		7.252.500				7.252.500		7.252.500					7.252.500	100,00%		
	Pengamanan Barang Milik Daerah		301.633.200				301.633.200		96.401.046					96.401.046	31,96%		
	Penilaian Barang Milik Daerah		6.629.500				6.629.500		3.360.000					3.360.000	50,68%		
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		130.969.600				130.969.600		36.430.600					36.430.600	27,82%		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		5.782.500				5.782.500		5.782.500					5.782.500	100,00%		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		294.266.866				195.000.000	489.266.866		262.761.072				262.761.072	53,71%		

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi								
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Modal	Total Belanja	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	3.770.450.600	0	0	0	0	3.770.450.600	0	3.713.721.873	0	0	0	0	3.713.721.873	98,50%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0	3.770.450.600	0	0	0	0	3.770.450.600	0	3.713.721.873	0	0	0	0	3.713.721.873	98,50%	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		47.515.800					47.515.800		41.130.910					41.130.910	86,56%	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		72.800.000					72.800.000		71.733.861					71.733.861	98,54%	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		94.930.700					94.930.700		81.072.700					81.072.700	85,40%	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		2.215.206.700					2.215.206.700		2.208.917.301					2.208.917.301	99,72%	
	Penagihan Pajak Daerah		883.426.200					883.426.200		883.304.200					883.304.200	99,99%	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		231.530.500					231.530.500		202.680.101					202.680.101	87,54%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		225.040.700					225.040.700		224.882.800					224.882.800	99,93%	
	Jumlah	12.938.589.221	26.153.857.936	5.026.657.361	6.916.418.500	205.890.152.100	593.646.750	257.519.321.868	9.544.470.446	24.613.919.276	663.440.000	6.701.978.800	190.714.113.665	0	232.237.922.187	90,18%	

Analisis akuntabilitas kinerja BPKPD tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pencapaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat kedalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah

Rasio belanja Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap sasaran strategis perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel. 3.9
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.812.521.363	27.016.341.453		0	0	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.801.000	44.620.400		0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.664.500	21.535.500				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.038.000	4.005.500				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.837.000	6.830.500				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.827.400	2.816.400				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.609.800	2.608.200				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.045.000	3.045.000				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.779.300	3.779.300				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.004.056.721	9.609.694.866		0	0	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.938.589.221	9.544.470.446				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.205.000	58.016.000				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.851.000	4.821.000				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.411.500	2.387.420				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.385.000	29.606.058		0	0	

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.700.000	12.065.058				
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.685.000	17.541.000				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	0				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.598.000	532.473.973		0	0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.050.500	14.389.000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.050.000	213.604.473				
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	304.497.500	304.480.500				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.305.800	388.071.508		0	0	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	397.305.800	388.071.508				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.352.229.892	16.047.947.541		0	0	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.548.500	89.344.002				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.932.123.392	15.641.434.872				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.890.000	16.896.000				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.668.000	300.272.667				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.144.950	363.927.107		0	0	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.692.000	41.026.819				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.930.000	102.183.494				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.232.950	189.335.294				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.290.000	31.381.500				
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	220.974.716.939	201.076.799.343		0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.769.180.500	1.690.004.769		0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.547.000	33.974.065				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.547.000	33.989.366				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	17.915.400	16.992.900				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	55.519.100	55.377.200				
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	746.457.000	718.718.765				
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	755.029.000	715.535.420				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	115.997.000	106.268.872				
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.926.500	1.916.284				
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7.242.500	7.231.897				
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	867.806.200	820.461.914		0	0	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.101.000	9.448.500				
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	331.203.000	312.450.314				
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	88.472.500	88.409.600				
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	38.044.000	30.491.500				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	399.985.700	379.662.000				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	432.549.578	421.306.640		0	0	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	28.902.000	24.519.590				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.236.878	9.501.100				
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	256.629.100	256.269.586				
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	115.588.900	111.315.264				
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	21.192.700	19.701.100				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	217.833.227.961	198.079.532.465		0	0	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	205.890.152.100	190.714.113.665				
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.026.657.361	663.440.000				
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.916.418.500	6.701.978.800				
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	71.952.700	65.493.555		0	0	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	71.952.700	65.493.555				
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	961.632.966	431.059.518		0	0	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	961.632.966	431.059.518		0	0	
		Penyusunan Standar Harga	20.098.800	19.071.800				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.252.500	7.252.500				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengamanan Barang Milik Daerah	301.633.200	96.401.046				
		Penilaian Barang Milik Daerah	6.629.500	3.360.000				
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	130.969.600	36.430.600				
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.782.500	5.782.500				
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	489.266.866	262.761.072				
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.770.450.600	3.713.721.873		0	0	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.770.450.600	3.713.721.873		0	0	
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	47.515.800	41.130.910				
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	72.800.000	71.733.861				
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	94.930.700	81.072.700				

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.215.206.700	2.208.917.301				
		Penagihan Pajak Daerah	883.426.200	883.304.200				
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	231.530.500	202.680.101				
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	225.040.700	224.882.800				

Berdasarkan tabel diatas rasio belanja yang terkait dengan Sasaran rasio **100%** dan rasio belanja yang tidak terkait dengan Sasaran rasio **0%**. Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah dalam mendukung tercapai visi misi kabupaten wajo rasio belanja yang terkait dengan sasaran lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran.

3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD

Tabel. 3.10
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

No	Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	220.974.716.939	201.076.799.343	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.812.521.363	27.016.341.453	
	(INDIKATOR : (1).Nilai / Predikat SAKIP Kabupaten, (2).Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.769.180.500	1.690.004.769	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.801.000	44.620.400	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.547.000	33.974.065	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.664.500	21.535.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.547.000	33.989.366	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.038.000	4.005.500	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	17.915.400	16.992.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.837.000	6.830.500	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	55.519.100	55.377.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.827.400	2.816.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	746.457.000	718.718.765	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.609.800	2.608.200	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	755.029.000	715.535.420	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.045.000	3.045.000	

No	Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	115.997.000	106.268.872	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.779.300	3.779.300	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.926.500	1.916.284	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.004.056.721	9.609.694.866	
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7.242.500	7.231.897	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.938.589.221	9.544.470.446	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	867.806.200	820.461.914	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.205.000	58.016.000	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.101.000	9.448.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.851.000	4.821.000	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	331.203.000	312.450.314	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.411.500	2.387.420	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	88.472.500	88.409.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.385.000	29.606.058	
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	38.044.000	30.491.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.700.000	12.065.058	

No	Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	399.985.700	379.662.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.685.000	17.541.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	432.549.578	421.306.640	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	0	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	28.902.000	24.519.590	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.598.000	532.473.973	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.236.878	9.501.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.050.500	14.389.000	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	256.629.100	256.269.586	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.050.000	213.604.473	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	115.588.900	111.315.264	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	304.497.500	304.480.500	

No	Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	21.192.700	19.701.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.305.800	388.071.508	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	217.833.227.961	198.079.532.465	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	397.305.800	388.071.508	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	205.890.152.100	190.714.113.665	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.352.229.892	16.047.947.541	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.026.657.361	663.440.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.548.500	89.344.002	
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.916.418.500	6.701.978.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.932.123.392	15.641.434.872	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	71.952.700	65.493.555	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.890.000	16.896.000	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	71.952.700	65.493.555	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.668.000	300.272.667	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.144.950	363.927.107	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.692.000	41.026.819	

No	Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.930.000	102.183.494	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.232.950	189.335.294	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.290.000	31.381.500	
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	961.632.966	431.059.518	
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	961.632.966	431.059.518	
					Penyusunan Standar Harga	20.098.800	19.071.800	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.252.500	7.252.500	
					Pengamanan Barang Milik Daerah	301.633.200	96.401.046	
					Penilaian Barang Milik Daerah	6.629.500	3.360.000	
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	130.969.600	36.430.600	

No	Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang TIDAK terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.782.500	5.782.500	
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	489.266.866	262.761.072	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.770.450.600	3.713.721.873	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.770.450.600	3.713.721.873	
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	47.515.800	41.130.910	
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	72.800.000	71.733.861	
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	94.930.700	81.072.700	
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.215.206.700	2.208.917.301	
					Penagihan Pajak Daerah	883.426.200	883.304.200	
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	231.530.500	202.680.101	
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	225.040.700	224.882.800	

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mendukung tercapainya sasaran RPJMD yang berkaitan dengan keuangan rasio Belanja yang terkait dengan sasaran lebih besar dengan rasio **86.58%** dari Belanja yang tidak terkait dengan sasaran dengan rasio **13.42%**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo tahun 2025 secara keseluruhan berhasil meskipun masih ada beberapa indikator yang belum dinilai karena dinilai oleh pihak eksternal. Harapan kami bahwa dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

B. Saran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo belajar dari penyusunan LKjIP tahunan merasa perlu memuat saran untuk stakeholder LKjIP Perangkat Daerah untuk perbaikan kualitas LKjIP sehingga data dan informasi yang tertuang pada LKjIP Perangkat Daerah dapat dinilai untuk menjadi dasar kebijakan dan strategi ke depan. Saran dimaksud antara lain:

1. Bahwa data capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja adalah akumulasi dari capaian kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sendiri dievaluasi per bulan, per triwulan, dan per semester. Di dalamnya juga terekam faktor penghambat dan pendorong atas capaian kinerja Program dan Kegiatan. Seluruh data tersebut akan menjadi acuan data dan informasi yang terangkum dalam LKjIP. Oleh karena itu, untuk memudahkan

- perekaman data tersebut dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan LKjIP Perangkat Daerah, evaluasi capaian indikator kinerja Subkegiatan sampai dengan Sasaran sebaiknya terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sehingga perubahan dan penyesuaian yang dilakukan pada penganggaran maupun perencanaan kinerja dapat terekam.
2. Perlunya peningkatan kualitas koordinasi semua stakeholder sejak tahap penyusunan sampai penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah.

Sengkang, 12 Januari 2026
KEPALA BPKPD KABUPATEN WAJO



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700815 199003 1 003

LAMPIRAN

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
2	Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3	Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4	Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5	Surat Edaran Nomor 900.1.1.4/ 1254/ BPKPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2025
6	Peraturan Bupati Wajo Nomor 44 Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025	Analisis Standar Belanja Tahun ANggaran 2025
7	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 44.2/XI/Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan danPertanggungjawaban Dana Operasional	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
8	Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2025	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (1) - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (4)	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9	Peraturan Bupati Wajo Nomor 31 Tahun 2025	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (1) - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (4)	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
10	Peraturan Bupati Wajo Nomor 42 Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
16	Keputusan Bupati Wajo nomor : 550.1/vi/tahun 2025	Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Pembentukan Tim Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2025
17	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 373/III/Tahun 2025	Pasal 108 huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Pembentukan Tim Penyusunan Renstra BPKPD Tahun 2025-2029
18	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 372/III/Tahun 2025	Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 125 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Pembentukan Tim Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2026
19	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 000/XII/Tahun 2025	Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 125 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Pembentukan Tim Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2027
20	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 52/1/ITahun 2025	Peraturan Bupati Wajo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Reribusi Daerah	Pembentuka Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Lingkup BPKPD Kab.Wajo Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
21	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 53/I/ITahun 2025	Peraturan Bupati Wajo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penetapan Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Empat Belas Kecamatan di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025
22	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 54/I/ITahun 2025	- Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Retribusi Daerah -Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penetapan Tahapan Penerimaan dan Besaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025
23	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 55/I/ITahun 2025	Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penetapan Tahapan Biaya Antar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang se Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025
24	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 723/XII/ITahun 2025	Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Kecamatan. Desa/Kelurahan, UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kolektor atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2025
25	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 648.1 / X / Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya	Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
26	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 76 / I / Tahun 2025	Pasal 325 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Pembentukan Panitia Penaksir Harga pada Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
27	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 410 / III / Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 103 ayat (1) dan (2), pasal 104 ayat (1) dan (2), pasal 105 ayat (1)	Pembentukan Tim Pelaksana Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025
28	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 29 / I / Tahun 2025	Pasal 329 ayat (1) dan(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dan bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi : penjualan, tukar menukar, hibah dan penyerahan modal	Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
29	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 27 / I / Tahun 2025	Pasal 296 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan yang berada dalam penguasaannya.	Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
30	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 28 / I / Tahun 2025	Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, objek pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD	Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
31	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 30 / I / 2025	Pasal 1 ayat (30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun; dan Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, perencanaan barang milik daerah dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD	Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
32	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 31 / I / Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 21 Ayat (2), Ayat (5) dan Ayat (6) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah berpedoman pada Standar Harga, Standar Harga sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf c yaitu besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan	Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2025
33	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 650.1 / X / Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870), Peraturan ini memberikan pedoman umum tentang pemberian insentif dan tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Penetapan Honorarium Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
34	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 411 / III / Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 103 ayat (1) dan (2), pasal 104 ayat (1) dan (2), pasal 105 ayat (1)	Penetapan Pejabat Penjual terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025
35	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 557.1 / VI/ Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);	Penetapan Standar Satuan Harga Barang Tahun 2026
36	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 586.1 / VIII / Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025
37	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 26 / I / Tahun 2025	Pasal 1 ayat (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan BMD berdasarkan dokumen sumber yang sama	Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025
38	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 25 / I / Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab.Wajo

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
39	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 63/ I / Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161.	Pembentukan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Kabupaten Wajo
40	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 62 / I / Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161.	Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025
41	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 636/ IX / Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 555 /VI/ Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 137/ I / Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 tentang "Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SKPD".	Penetapan Besaran Tunjangan Pengelola Keuangan ASN
44	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 684/XI/ Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Kantor Desa
45	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 655.1/ X/ Tahun 2025	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran I.I.1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.	Perubahan Penetapan Besaran Tunjangan Pengelola Keuangan ASN
46	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 374 /III/ Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Perubahan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan
47	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 513.1 / V / Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Penetapan Nomor Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Pemda

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
48	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 640/ IX/ Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);	Penetapan Nomor Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Pemda
49	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 554/ VI/ Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
50	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 682/ XI/2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan
51	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 719 / XII / Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan
52	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 566/ VII/ Tahun 2025	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I huruf G angka 10 dan angka 15	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan
53	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 421/ III/ Tahun 2025	Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa	Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
54	Keputusan Bupati Wajo Nomor : 648/X/ Tahun 2025	Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa	Perubahan atas Keputusan Bupati Wajo nomor 421/ III/ Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Dokumen Persyaratan Penyaluran dana desa tahun anggaran 2025
55	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 202	Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jemberdelleng No. 1 64001 71711 Sempang, Sempang

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juni 2023
Jam : 10.00 sampai selesai
Tempat : Aula BPKPD Kab. Wajo
Agenda : Rapat Koordinasi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. Solijoo	seleksi	[Signature]
2	SUAROI	Kabid. PABD	[Signature]
3	Taufik Hayyati at	Korvid atot	[Signature]
4	ANDI RUCANUS P	Korbid PABD	[Signature]
5	ARTIBAR	FUNCTIONAL	[Signature]
6	NURA ENI	Korbid. & Keresnawati	[Signature]
7	HARYADI	PERENCANAAN	[Signature]
8	AMBO MASIE	BPKPD	[Signature]
9	ABEP		[Signature]
10	NURHAIDA	Pengelela Daerah	[Signature]
11	ALVIANA AN	kas	[Signature]
12	ANDI RUCANUS SANTI RUCANUS	kas	[Signature]
13	HOPWANTI. RIDWAN	Staf	[Signature]
14	ACHMANTY.	Staf	[Signature]
15	A. SRIWALUYUWI	Staf Alubas	[Signature]
16	A. MORTINI	Staf Alubas	[Signature]

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
17	Bago Rizka	Staf	
18	Widyadani	Staf	
19	Dewi Maffira Jorini	Staf	
20	Maheswanti	Staf	
21	A-Rizka	Staf	
22	Chandra Winda	Staf	
23	Gusti Afrina	Staf	
24	Huriani	Staf	
25	Fitriani	Staf alihansi	
26	Supriani	—	
27	Dewi	Staf	
28	Amriani	Staf	
29	Amriani	Staf	
30	Siti Handayani	Staf alihansi	
31	Seliana	Staf Aset	
32	Mela P	Staf B.PAD	
33	Amriani	Staf	
34	Eviyanti	Staf	
35	Bago Anis Triandani	Staf pertra	
36	Muti. Idris	Staf	
37	Irfan Octavian	kecubid. palapotan	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
38	Ashrafuddin	Ketua PADI	
39	Samsudin, S.Sos	Staf	
40	Pada Syahrial, S.Sos	"	
41	Andi Harris, S.Sos	"	
42	Abd Aminudin	"	
43	Muti Lili, S.Sos	"	
44	Muti Yusuf, S.Sos	"	
45	Jurman	"	
46	Andi Dina	"	
47	Murni Sari	Staf	
48	Kasim	Staf	
49	A. Sri Pu	Staf	
50	A. Marwati	Staf	
51	A. Tami Wicak	analis pgsd. Daman	
52	Nurmalia	Prnt	
53	Margari	Staf	
54	Rosa Puterana	-	
55	Holpion	Kerubog Kau	
56	Heran	Staf	
57	Senark	Staf	
58	Ludyanal	"	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
59	PwI FADIAH ANGGARA	STAF	
60	HARWANTI PURNAMA	STAF	
61	SARILI SULISTYAN	STAF	
62	DARNANINGRIT	STAF	
63	Hj Hoshi	STAF	
64	ANDI HARTATI	STAF	
65	Junggrah	STAF	
66	Rani Langrat	Kanibbi d	
67	STI YULIANTI	STAF	
68	DIANE LILYANAWATI	STAF	
69	MUHAMMAD	STAF	
70	RESKY ANWAR GAD	STAF	
71	A BAI HUZAIMAH	STAF	
72	PATISURAT	STAF	
73	SHALYATI	STAF	
74	Hj. PERISA	MANAJA	
75	Husnanayah	STAF	

Sengkang, 18 Agustus 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDARATAN DAERAH KABUPATEN WAJI

Drs. H. DABLIAN, S.M.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 14685515 199309 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.

Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. ANDI ROSMAN, S.Sos., M.M.

Jabatan : Bupati Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. ANDI ROSMAN, S.Sos., M.M.

Pihak Pertama,

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 1990031 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	14
		Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20
		Indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan	14
		Indeks penyerapan anggaran	16
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	13
		Indeks Opini BPK	15
2.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Kontribusi PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap total Pendapatan Daerah	11,00%
3.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (>80-90)

Sengkang, 17 Oktober 2025

BUPATI WAJO


H. ANDI ROSMAN, S.Sos., M.M.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAJO


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP : 19700815 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAJO

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai standar	100%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.990.021.363	DAU, PAD, DBH
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 220.974.716.939	DAU, PAD, DBH, DD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 761.632.966	DAU, PAD
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.770.450.600	PAD
		Rp 257.496.821.868	

Sengkang, 17 Oktober 2025

BUPATI WAJO


H. ANDI ROSMAN, S.Sos., M.M.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAJO


ANDI PALLAWARURKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19700515 199005 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAJO

No.	Indikator Kinerja Lainnya	Target
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase pencapaian Program Strategis Nasional	-
2.	Persentase pencapaian 8 (delapan) Program Wajo Maradeka	100%
3.	Persentase pemenuhan indikator MCSP KPK	100%
4.	Persentase kemajuan kegiatan (fisik) perangkat daerah	100%
5.	Persentase penyerapan anggaran	100%
6.	Persentase Temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (termasuk temuan selama bertahun-tahun tidak selesai) sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang terlambat atau belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan masih relevan sampai tahun 2025	0%
7.	Persentase Pelaporan LHKPN secara lengkap dan tepat waktu	100%
8.	Persentase Pemenuhan Target PAD pada perangkat daerah atau PBB pada Kecamatan Tahun 2025	100%
9.	Persentase Realisasi DAK dan DAU SG Tahun 2025	100%
10.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1
11.	Persentase Laporan pengaduan/aspirasi masyarakat sesuai kewenangan perangkat daerah yang diselesaikan pada tingkat perangkat daerah	100%
12.	Persentase Perintah atau arahan Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah baik lisan maupun tertulis yang terlambat atau tidak diselesaikan dengan baik oleh perangkat daerah sepanjang tahun 2025	0%
13.	Predikat Penilaian Kebersihan Kantor Perangkat Daerah	BAIK
14.	Jumlah Penghargaan yang diterima oleh perangkat daerah dan/atau pemerintah daerah atas kontribusi perangkat daerah Tahun 2025	1
15.	Jumlah bantuan Pusat (anggaran, barang dan/atau jasa) yang diterima oleh pemerintah daerah atas kontribusi perangkat daerah Tahun 2025	Rp. 1,265,616,382,958

Sengkang, 17 Oktober 2025

BUPATI WAJO

H. ANDI ROSMAN, S.Sos., M.M.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAJO**

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP : 19700815 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Jabatan : Sekretaris BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.

Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003


ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.
Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b
NIP : 19730928 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %
4.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	100 %
5.	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Pemunjang Urusan Perangkat Daerah yang diadakan	100 %
6.	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	100 %
7.	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Pemunjang Urusan yang Terpelihara	100 %
8.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 44.801.000	DAU, PAD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.981.556.721	DAU, PAD, DBH
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 38.385.000	PAD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 560.098.000	DAU, PAD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 397.305.800	PAD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 17.552.229.892	PAD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 415.644.950	DAU, PAD
8.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 217.833.227.961	DAU, PAD, DD, DBH
Jumlah		Rp 249.833.249.324	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.P., M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, III/c
NIP : 19700815 199003 1 003

SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO

ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.
Pangkat : Pembina, Tk. I (V/d)
NIP : 19720928 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
01	02	03	04
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7.	Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
8.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 Orang/bulan
9.	Tertelaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
10.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
11.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
12.	Tersedianya Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket
13.	Tertelaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
14.	Tertelaksananya Dibimbing Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Dibimbing Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
15.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
16.	Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
17.	Tertelaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
18.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit
19.	Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
20.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
21.	Tersedianya Jasa Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan

22.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
23.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
24.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit
25.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
26.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit
27.	Tersedianya Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
28.	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
29.	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 21.664.500	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 4.038.000	PAD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.837.000	PAD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp 2.827.400	PAD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 2.609.800	PAD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.045.000	PAD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.779.300	PAD
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.916.089.221	DBH, DAU, PAD
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 58.205.000	PAD
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.851.000	PAD
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 2.411.500	PAD
12.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 12.700.000	PAD
13.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 17.685.000	PAD
14.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 8.000.000	PAD
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.050.500	PAD
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 240.550.000	PAD
17.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 304.497.500	PAD, DAU
18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 397.305.800	PAD
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 89.548.500	PAD

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	17.132.123.392	PAD
21.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	20.850.000	PAD
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	309.668.000	PAD
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	72.692.000	DAU
24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	106.430.000	PAD
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	198.232.950	DAU
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	38.290.000	PAD
27.	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Rp	205.890.152.100	DAU, DD
28.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp	5.026.657.361	DAU
29.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp	6.916.418.500	PAD
	Jumlah	Rp	249.823.249.324	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA EPRPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.P., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda, P.1/P

NIP : 19706613 199003 1 001

SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO

ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b

NIP : 19730928 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Jabatan : Sekretaris BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.
Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b
NIP : 19730928 200604 1 004

Pihak Pertama,

AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19870528 200604 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Paludan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket
2.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
6.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
7.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit
8.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
9.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
10.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit
14.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	15 Unit

Sengkang, 17 Oktober 2025

SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO



ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b

NIP : 19730928 200604 1 004

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BPKPD KAB. WAJO



AVITRI GANI, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19870528 200604 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Jabatan : Sekretaris BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.
Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b
NIP : 19730928 200604 1 004

Pihak Pertama,

HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.
Pangkat : Penata, III/d
NIP : 19800127 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 Orang/bulan
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
5.	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
6.	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
7.	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan

Sengkang, 17 Oktober 2025

SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO

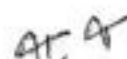


ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b

NIP : 19730928 200604 1 004

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKPD KAB.
WAJO



HELFIANA HASYIM, SH, M.Si.

Pangkat : Penata, III/d

NIP : 19800127 200604 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYADI, S.E.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Jabatan : Sekretaris BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.
Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b
NIP : 19730928 200604 1 004

Pihak Pertama,

HARYADI, S.E.
Pangkat : Penata, III/c
NIP : 19801202 201402 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

Sengkang, 17 Oktober 2025

SEKRETARIS BPKPD KAB. WAJO



ANDI SAHLAN, SE., Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina, Tk. I IV/b

NIP : 19730928 200604 1 004

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO



HARYADI, S.E.

Pangkat : Penata, III/c

NIP : 19801202 201402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ASHAWALUDDIN, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003


H. ASHAWALUDDIN, ST., MM
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780107 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	100 %


No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.482.443.900	PAD
	Jumlah	Rp 1.482.443.900	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 007

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD
KAB. WAJO


H. ASHAWALUDDIN, ST., MM
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780107 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
3.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
4.	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen
5.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	47.515.800	PAD
2.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp	94.930.700	PAD
3.	Penagihan Pajak Daerah	Rp	883.426.200	PAD
4.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp	231.530.500	PAD
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp	225.040.700	PAD
Jumlah		Rp	1.482.443.900	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19700815 199003 1 001

**KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD
KAB. WAJO**

H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780107 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SOJI FEBRIANTY, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemungutan, Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. ASHAWALUDDIN, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. ASHAWALUDDIN, ST., MM
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780107 201001 1 006

Pihak Pertama,

ANDI SOJI FEBRIANTY, SE
Pangkat : Penata TK I, III/d
NIP : 19840918 200604 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB.
WAJO



H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780107 201001 1 006

KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN
DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD
KAB. WAJO



ANDI SOJI FEBRIANTY, SE

Pangkat : Penata TK I, III/d
NIP : 19840918 200604 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMLANSYAH, S.H.,M.Si.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan,Pendaftaran dan Pengawasan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. ASHAWALUDDIN, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780107 201001 1 006

Pihak Pertama,

RAMLANSYAH, S.H.,M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19830811 200902 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen
2.	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB.
WAJO



H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780107 201001 1 006

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN
DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO



RAMLANSYAH, S.H., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19830811 200902 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTIDAR, S.E.

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780107 201001 1 006

Pihak Pertama,

ASTIDAR, S.E.

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19830716 200701 2 018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan

Sengkang, 17 Oktober 2025


**KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PAJAK DAERAH LAINNYA BPKPD KAB.
WAJO**



H. ASHAWALUDDIN, ST., MM

Fungsional : Pembina, IV/a
NIP : 19780107 201001 1 006

**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD
KAB. WAJO**



ASTIDAR, S.E.

Fungsional : Penata, III/d
NIP : 19830716 200701 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUARDI, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.

Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003


SUARDI, S.Sos.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19771127 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	50 Dokumen
2.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen
3.	Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan
4.	Tertaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan
5.	Tertaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, emindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
6.	Tertaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan
7.	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Standar Harga	Rp 20.098.800	DAU
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 7.252.500	DAU
3.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 101.633.200	DAU
4.	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 6.629.500	DAU
5.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 130.969.600	DAU
6.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 5.782.500	DAU
7.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 489.266.866	PAD, DAU
Jumlah		Rp 761.632.966	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19700815 199003 1 003

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. WAJO

SUARDI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19771127 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025


KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai standar	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 761.632.966	DAU, PAD
	Jumlah	Rp 761.632.966	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BPKPD KAB. WAJO


SUARDI, S.Sos.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19771127 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUARDI, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

SUARDI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19771127 199703 1 002

Pihak Pertama,

TAUFIQ HASYIM, AR, S.E,M.Si.

Pangkat : Penata, III/d
NIP : 19810117 201101 1 001

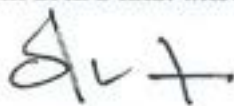
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	50 Dokumen
2.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan
3.	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan
4.	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, emindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
5.	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan
6.	Terstusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BPKPD KAB. WAJO

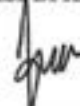


SUARDI, S.Sog.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19771127 199703 1 002

KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN
INVENTARISASI BPKPD KAB. WAJO



TAUFIQ HASYIM, AR, S.E.M.SI.

Pangkat : Penata, III/d

NIP : 19810117 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. RESNA, M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUARDI, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

SUARDI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19771127 199703 1 002

Pihak Pertama,

Dra. Hj. RESNA, M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19671231 199703 2 022

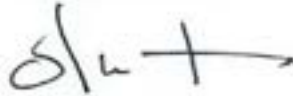
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BPKPD KAB. WAJO



SUARDI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19771127 199703 1 002

KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BPKPD KAB. WAJO



Dra. Hj. RESNA, M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19671231 199703 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003


SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD secara Tepat Waktu	100 %
2.	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah yang dikelola	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.695.746.000	DAU, PAD
2.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp 71.952.700	DAU
	Jumlah	Rp 1.767.698.700	

Selegkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO


ANDI PALLAWARUKKA, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700813 199003 1 005

KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN
PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO


SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
2.	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
4.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
5.	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen
7.	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang
8.	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp	34.547.000	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp	34.547.000	DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp	746.457.000	PAD, DAU
4.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp	755.029.000	PAD, DAU
5.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp	115.997.000	DAU
6.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp	1.926.300	DAU
7.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	7.242.500	DAU
8.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp	71.952.700	DAU
Jumlah		Rp	1.767.698.700	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19700815 199003 1 003

**KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN
PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO**

SYAHMADYAH, S.E., M.A.P.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780712 200701 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,


SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 023

Pihak Pertama,


ANDI RUSMIN, P. S.Kom.M.I.Kom
Pangkat : Penata, III/d
NIP : 19790822 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
2.	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
4.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
5.	Terlaksunanya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN
PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO


SYAHMAL YAH, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 020

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB.
WAJO


ANDI RUSMIN, P. S.Kom, M.I.Kom
Pangkat : Penata, III/d
NIP : 19790822 201301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 023


YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19800712 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD KAB. WAJO

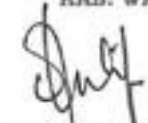
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32 Orang

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN
PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO


SYAHMANIYAH, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 023

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD
KAB. WAJO


YULIANA BASFAIN, S.KM., M.M.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19800712 200502 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. AKAS, S.Sos.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah
BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan BPKPD Kab.
Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAHMADIYAH, S.E., M.A.P.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 023

H. AKAS, S.Sos.

Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751004 200701 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN
PENDAPATAN BPKPD KAB. WAJO


SYAHMADIVAN, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780712 200701 2 023

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH BPKPD KAB. WAJO


H. AKAS, S.Sos.
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP. 19751004 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBB-P2 dan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 083


SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780505 200801 2 033

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.288.006.700	PAD
	Jumlah	Rp 2.288.006.700	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199005 4 001

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO


SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780505 200801 2 033

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
2.	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	357600 Obyek Pajak

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 72.800.000	PAD
2.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 2.215.206.700	PAD
	Jumlah	Rp 2.288.006.700	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 19700915 199003 1 00

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO

SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780505 200801 2 033



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. SATRIAWATI, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemungutan, Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBB-P2 dan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780505 200801 2 033

Hj. SATRIAWATI, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina , IV/a
NIP : 19801021 200502 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	357600 Obyek Pajak

Sengkang, 17 October 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO

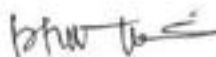


SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780505 200801 2 033

KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN, PENAGIHAN
DAN KEBERATAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO



Hj. SATRIAWATI, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19801021 200502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. SRI RAHAYU NINGSI, S.E.
Jabatan : Penilai Pemerintah BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBB-P2 dan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780505 200801 2 033

Pihak Pertama,

A. SRI RAHAYU NINGSI, S.E.
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP : 19790727 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PENILAI PEMERINTAH BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan

Sengkang, 17 Oktober 2025

**KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO**

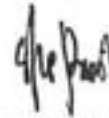


SYARIPAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780505 200601 2 033

PENILAI PEMERINTAH BPKPD KAB. WAJO



A. SRI RAHAYU NINGSI, S.E.

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19790727 200604 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF,S.Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBB-P2 dan BPHTB BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19780505 200801 2 033

ARIF,S.Sos.

Pangkat : Penata, III/d
NIP : 19811004 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terperuhnya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	357600 Obyek Pajak

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PENGAWASAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO



SYARIFAH CHAERUL YAMAN, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19780505 200601 2 033

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PBB-P2 DAN BPHTB BPKPD KAB.
WAJO



ABDUL S.Sos.

Pangkat : Pemata, III/d

NIP : 19811004 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA
BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003

ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19720106 199803 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

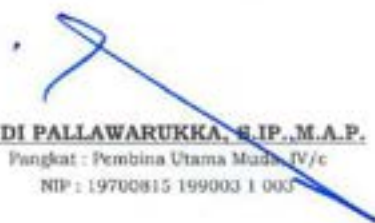
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGENDALIAN OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD secara Tepat Waktu	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 867.806.200	DAU, PAD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 73.434.500	DAU
	Jumlah	Rp 941.240.700	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
PENGENDALIAN OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO


ANDI MIHARAH, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19720106 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Otorisasi DPA BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA
BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ANDI MIHARAH, S.Sos.,M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19720106 199803 2 005

HARTINI BASIR, S.KM.,M.Kes.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19760730 200701 2 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(I)	(II)	(III)	(IV)
1.	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen
2.	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen
3.	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	780 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen
5.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen
6.	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen
7.	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	92 Orang

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp	17.915.400	DAU
2.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp	55.519.100	DAU
3.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp	10.101.000	DAU
4.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	331.203.000	DAU
5.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp	88.472.500	PAD
6.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp	38.044.000	DAU
7.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	399.985.700	DAU
Jumlah		Rp	941.240.700	

Sengkang, 17 Oktober 2025

**KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
PENGENDALIAN OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO**



ANDI MIHARAH, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19720106 199803 2 005

**KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA
BPKPD KAB. WAJO**



HARTINI BASIR, S.KM., M.Kes.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19760730 200701 2 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen
2.	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen
3.	Terlaksananya Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	780 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen
5.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen
6.	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen
7.	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	92 Orang

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
PENGENDALIAN OTORISASI DPA BPKPD KAB. WAJO



ANDI MIHARAH, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19720106 199803 2 005

KEPALA SUB BIDANG OTORISASI DPA
BPKPD KAB. WAJO



HARTINI BASIR, S.KM., M.Kes.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19760730 200701 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj.SITTI FATIMAH

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.

Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

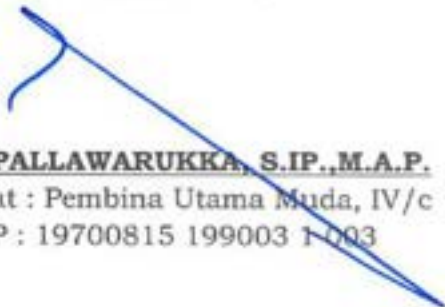
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.,M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700815 199003 1 003


Dra. Hj.SITTI FATIMAH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19680310 199003 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan
3.	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan
4.	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen
5.	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp 28.902.000	DAU
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 10.236.878	DAU
3.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 256.629.100	PAD, DAU
4.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 115.588.900	DAU
5.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 21.192.700	DAU
Jumlah		Rp 432.549.578	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP : 19700815 199003 1 003

**KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BPKPD KAB. WAJO**

Dra. Hj. SITI FATIMAH

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 19680310 199003 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah OPD yang menyetor Pelaporan Keuangan secara tepat waktu	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 432.549.578	DAU, PAD
	Jumlah	Rp 432.549.578	

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BPKPD KAB. WAJO

ANDI PALLAWARUKKA, S.P., M.A.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda, G/c
NIP : 19700815 199003 1 003

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BPKPD KAB. WAJO

Dra. Hj. SITI FATIMAH

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19680310 199003 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI NURHAEDAH, S.E.,M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. Hj.SITTI FATIMAH

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Hj.SITTI FATIMAH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19680310 199003 2 009

ANDI NURHAEDAH, S.E.,M.Si.
Pangkat : Pembina , IV/a
NIP : 19720825 200604 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen
2.	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BPKPD KAB. WAJO


Dra. Hj. SITI FATIMAH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19680310 199003 2 009

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BPKPD KAB.
WAJO


ANDI NURHAEDAH, S.E., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19720825 200604 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.,M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. Hj.SITTI FATIMAH

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kab. Wajo

Selaku atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Hj.SITTI FATIMAH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19680310 199003 2 009

IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.,M.Si.
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP : 19841028 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB. WAJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan
2.	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan
3.	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang

Sengkang, 17 Oktober 2025

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BPKPD KAB. WAJO


Dra. Hj. SITI FATIMAH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19680310 199003 2 009

KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN BPKPD KAB.
WAJO


IRFAN OKTAVIAWAN, S.E.M.Si.
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP : 19841028 200902 1 002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD			
KAB. WAJO TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025													
SKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								Rp39.069.947.157,00	Rp593.646.750,00	Rp5.026.657.361,00	Rp212.806.570.600,00	Rp257.496.821.868,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp39.069.947.157,00	Rp593.646.750,00	Rp5.026.657.361,00	Rp212.806.570.600,00	Rp257.496.821.868,00	
5	02				KEUANGAN			Rp39.069.947.157,00	Rp593.646.750,00	Rp5.026.657.361,00	Rp212.806.570.600,00	Rp257.496.821.868,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp31.591.374.613,00	Rp398.646.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.990.021.363,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp44.801.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.801.000,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rp21.664.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.664.500,00	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Rp4.038.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.038.000,00	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Rp6.837.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.837.000,00	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Rp2.827.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.827.400,00	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Rp2.609.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.609.800,00	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reallsasi Kinerja SKPD			Rp3.045.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.045.000,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp3.779.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.779.300,00	
5	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
5	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp12.981.556.721,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.981.556.721,00		
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rp12.916.089.221,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.916.089.221,00		
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Rp58.205.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.205.000,00		
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rp4.851.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.851.000,00		
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Rp2.411.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.411.500,00		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp38.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.385.000,00		
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Rp12.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.700.000,00		
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Rp17.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.685.000,00		
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp560.098.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.098.000,00		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rp15.050.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.050.500,00		
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp240.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.550.000,00		
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Rp304.497.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.497.500,00		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp11.007.000,00	Rp386.298.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.305.800,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp11.007.000,00	Rp386.298.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.305.800,00		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp17.552.229.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.552.229.892,00		
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp89.548.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.548.500,00		
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp17.132.123.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.132.123.392,00		
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp20.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.890.000,00		
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp309.668.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.668.000,00		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp403.297.000,00	Rp12.347.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.644.950,00		
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rp72.692.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.692.000,00		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp106.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.430.000,00		
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rp185.885.000,00	Rp12.347.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.232.950,00		
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp38.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.290.000,00		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Rp3.141.488.978,00	Rp0,00	Rp5.026.657.361,00	Rp212.806.570.600,00	Rp220.974.716.939,00		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Rp1.769.180.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.769.180.500,00		
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Rp34.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.547.000,00		
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Rp34.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.547.000,00		
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			Rp17.915.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.915.400,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Rp55.519.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.519.100,00	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Rp746.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp746.457.000,00	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Rp755.029.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.029.000,00	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Rp115.997.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.997.000,00	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Rp1.926.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.926.500,00	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Rp7.242.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.242.500,00	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Rp867.806.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp867.806.200,00	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengondasian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Rp10.101.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.101.000,00	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Rp331.203.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.203.000,00	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			Rp88.472.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.472.500,00	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Rp38.044.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.044.000,00	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Rp399.985.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.985.700,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T. 1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Rp432.549.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp432.549.578,00	
5	02	02	2.03	0002	Rekonellasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			Rp28.802.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.802.000,00	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Rp10.236.878,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.236.878,00	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Rp256.629.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.629.100,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Rp115.588.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.588.900,00	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Rp21.192.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.192.700,00	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp5.026.657.361,00	Rp212.806.570.600,00	Rp217.833.227.961,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.890.152.100,00	Rp205.890.152.100,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Rp0,00	Rp0,00	Rp5.026.657.361,00	Rp0,00	Rp5.026.657.361,00	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.916.418.500,00	Rp6.916.418.500,00	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			Rp71.952.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.952.700,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			Rp71.952.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.952.700,00	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Rp566.632.966,00	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp761.632.966,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			Rp566.632.966,00	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp761.632.966,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T	Tahun				
									1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga			Rp20.098.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.098.800,00	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			Rp7.252.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.252.500,00	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			Rp101.633.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.633.200,00	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah			Rp6.629.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.629.500,00	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahlanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Rp130.969.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.969.600,00	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Rp5.782.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.782.500,00	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Rp294.266.866,00	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.266.866,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Rp3.770.450.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.770.450.600,00	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Rp3.770.450.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.770.450.600,00	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Rp47.515.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.515.800,00	
5	02	04	2.01	0003	Penyutuhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Rp72.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.800.000,00	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Rp94.930.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.930.700,00	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Rp2.215.206.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.215.206.700,00	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah			Rp883.426.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp883.426.200,00	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Rp231.530.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.530.500,00	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Rp225.040.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.040.700,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp120.415.567.223,00
Februari	Rp397.204.100,00
Maret	Rp0.699.183.485,00
April	Rp3.237.336.176,00
Mai	Rp4.783.165.155,00
Juni	Rp4.337.080.000,00
Juli	Rp106.614.371.747,00
Agustus	Rp3.280.511.000,00
September	Rp131.420.400,00
Oktober	Rp3.904.587.282,00
November	Rp417.742.800,00
Desember	Rp78.652.500,00
Jumlah	Rp257.496.821.868,00

Sengkang, Tanggal 18 Oktober 2025
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P
 NIP. 197008151990031003

Mengesahkan,
 PPKD



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P
 NIP. 197008151990031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. ARMAYANI, M.Si	196611251990032009	KETUA UMUM	
2.	MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si	198107262000121001	WAKIL KETUA BIDANG PERENCANAAN	
3.	ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P	197008151990031003	WAKIL KETUA BIDANG PENGANGGARAN	
4.	SYAHMADIYAH, S.E. M.A.P	197807122007012023	SEKRETARIS UMUM	
5.	Dra. SUSIAWATY PANIKKAI, M.Si	197505261993112001	SEKRETARIS BIDANG PERENCANAAN	
6.	ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si	197309282006041004	SEKRETARIS BIDANG PENGANGGARAN	
7.	ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H	198401182006042010	KOORDINATOR ANGGOTA	

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Andi Pallawarukka' and another that is less legible.

8.	ANDI MIHARAH, S.Sos., M.Si	197201061998032005	ANGGOTA	
9.	H. ASHAWALUDDIN, S.T	197801072010011006	ANGGOTA	
10.	SUARDI, S.Sos	197711271997031002	ANGGOTA	
11.	Dra. Hj. SITI FATIMAH	196803101990032009	ANGGOTA	

*) Sesuai periodisasi SPD